#bangga melayani bangsa

WBK
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KEUANGAN TA 2023 AUDITED

Balai Besar POM di Makassar

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

1500533 HALOBPOM
0852-11111-533
bpom.makassar
bpom.mks
bbpom-makassar.com
Bbpom Makassar
makassar.pom.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Balai Besar POM di Makassar,

Dra. Hariani, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB..... iv
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN..... 1
I. Laporan Realisasi Anggaran..... 3
II. Neraca..... 4
III. Laporan Operasional..... 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas..... 6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan..... 7
A. Penjelasan Umum..... 7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BBPOM di Makassar..... 7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan..... 9
A.3. Basis Akuntansi..... 10
A.4. Dasar Pengukuran..... 10
A.5. Kebijakan Akuntansi..... 10
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran..... 20
B.1. Pendapatan..... 21
B.2. Belanja..... 23
B.3. Belanja Pegawai..... 25
B.4. Belanja Barang..... 26
B.5. Belanja Modal..... 27
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca..... 29
C.1. Aset Lancar..... 29
C.2. Aset Tetap..... 29
C.3. Aset Lainnya..... 37
C.4. Kewajiban Jangka Pendek..... 40
C.5. Ekuitas..... 41
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional..... 42
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak..... 42
D.2. Beban Pegawai..... 43
D.3. Beban Persediaan..... 43
D.4. Beban Barang dan Jasa..... 44

D.5. Beban Pemeliharaan..... 45
D.6. Beban Perjalanan Dinas..... 45
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 46
D.8. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional..... 47
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas..... 49
E.1. Ekuitas Awal..... 49
E.2. Surplus (Defisit) LO..... 49
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi 49
E.5. Transaksi Antar Entitas..... 50
E.6. Ekuitas Akhir..... 52
F. Pengungkapan Penting Lainnya..... 53

LAMPIRAN.....

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496
Email : bbpomdimakassar@gmail.com, Email : bpom_makassar@pom.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar POM di Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Balai Besar POM di Makassar,

Dra. Hariani, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar POM di Makassar Tahun Anggaran 2023 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp943.660.200,00 atau 231% dari estimasi pendapatan sebesar Rp408.885.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.081.318.876,00 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp55.506.110.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp103.219.615.405,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6.145.969.319,00. Aset Tetap (neto) sebesar Rp96.953.499.135,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp120.146.951,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp236.248.299,00 dan Rp102.983.367.106,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp907.893.329,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp55.012.111.063,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp54.104.217.734,00. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non

Operasional sebesar Rp275.996.129,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp54.380.213.863,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp92.048.820.604,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp54.380.213.863,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp4.895.679,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp65.309.864.686,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp102.983.367.106,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023			% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	408,885,000	943,660,200	534,775,200	230.79	855,358,722
UMLAH PENDAPATAN		**408,885,000**	**943,660,200**	**534,775,200**	**230.79**	**855,358,722**
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	18,587,496,000	18,541,394,447	(46,101,553)	99.75	19,680,877,443
Belanja Barang	B.4	27,818,929,000	27,446,730,367	(372,198,633)	98.66	23,931,035,467
Belanja Modal	B.5	9,099,685,000	9,093,194,062	(6,490,938)	99.93	9,994,022,172
JUMLAH BELANJA		**55,506,110,000**	**55,081,318,876**	**(424,791,124)**	**99.23**	**53,605,935,082**

Makassar, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Balai Besar POM di Makassar,

Dra. Hariani, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

II. NERACA

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR	**C.1**		
Persediaan	C.1.1	6,145,969,319	6,342,942,204
Jumlah Aset Lancar		**6,145,969,319**	**6,342,942,204**
ASET TETAP	**C.2**		
Tanah	C.2.1	37,457,820,000	37,457,820,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	109,533,991,596	89,432,103,947
Gedung dan Bangunan	C.2.3	20,545,394,998	20,545,394,998
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	463,074,700	463,074,700
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	309,830,100	309,830,100
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(71,356,612,259)	(62,411,505,779)
Jumlah Aset Tetap		**96,953,499,135**	**85,796,717,966**
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1		- 5,500,000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	120,146,951	
Aset Lain-Lain	C.3.3		- 471,216,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4		- (474,653,500)
Jumlah Aset Lainnya		120,146,951	2,062,500
JUMLAH ASET		**103,219,615,405**	**92,141,722,670**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.4**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	236,248,299	92,902,066
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.4.2	236,248,299	92,902,066
JUMLAH KEWAJIBAN		**236,248,299**	**92,902,066**
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	102,983,367,106	92,048,820,604
JUMLAH EKUITAS		102,983,367,106	92,048,820,604
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**103,219,615,405**	**92,141,722,670**

Makassar, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Balai Besar POM di Makassar,

Dra. Hariani, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	907,893,329	692,962,496
JUMLAH PENDAPATAN		**907,893,329**	**692,962,496**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	18,558,345,923	19,681,584,527
Beban Persediaan	D.3	3,346,517,455	2,553,912,527
Beban Barang dan Jasa	D.4	9,494,311,638	8,844,550,833
Beban Pemeliharaan	D.5	2,586,103,077	2,086,073,802
Beban Perjalanan Dinas	D.6	12,197,504,926	10,208,029,702
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	8,829,328,044	7,887,396,661
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**55,012,111,063**	**51,261,548,052**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(54,104,217,734)**	**(50,568,585,556)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(161,547,685)**	**126,299,999**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		19,913,312	126,299,999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		181,460,997	
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(114,448,444)**	**8,784,950**
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		**15,853,559**	**43,018,707**
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		**130,302,003**	**34,233,757**
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	**(275,996,129)**	**135,084,949**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**(54,380,213,863)**	**(50,433,500,607)**
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(54,380,213,863)**	**(50,433,500,607)**

Makassar, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Balai Besar POM di Makassar,

Dra. Hariani, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	**92,048,820,604**	**88,740,310,762**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(54,380,213,863)	(50,433,500,607)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	4,895,679	233,751
Koreksi Lain-lain	E.4.6	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI KUITAS		**4,895,679**	**233,751**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	**65,309,864,686**	**53,741,776,698**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**10,934,546,502**	**3,308,509,842**
EKUITAS AKHIR	E.6	**102,983,367,106**	**92,048,820,604**

Makassar, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Balai Besar POM di Makassar,

Dra. Hariani, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar POM di Makassar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
2. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai berikut:

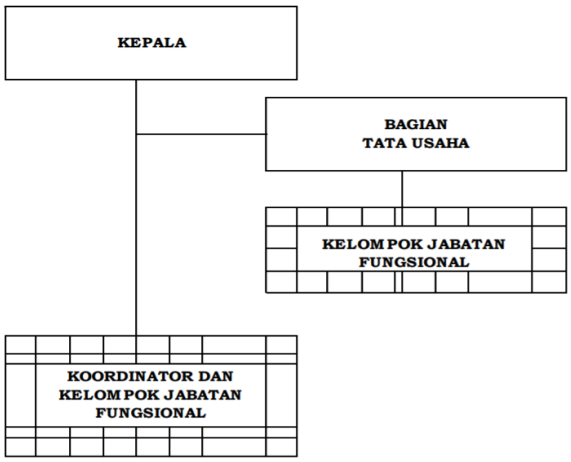

Renstra Balai Besar POM di Makassar memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas

dan fungsi Balai Besar POM di Makassar untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019-2024

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

> ***"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Misi Balai Besar POM di Makassar sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar POM di Makassar *Audited* Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar POM di Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntaansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Balai Besar POM di Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar POM di Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2023 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Pendapatan LRA

1. PENDAPATAN-LRA

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

2. PENDAPATAN-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Besar POM di diisi nama satker adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
- Pendapatan Sewa Rumah Dinas
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. BELANJA

a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. BEBAN

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. ASET LANCAR

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
   b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang ditentukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	U r ai a n	Penyisihan
Lancar	*Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo*	*0.5%*
Kurang Lancar	*Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan*	*10%*
Diragukan	*Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan*	*50%*
Macet	• *Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan* • *Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN*	*100%*

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

4) Persediaan merupakan aset yang berupa:
   a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
      (1) Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
      (2) Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
      (3) Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
   b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh : bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
   c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh :

baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

5) Persediaan disajikan sebesar :

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:

(1) Harga pembelian
(2) Biaya pengangkutan
(3) Biaya penanganan
(4) Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

b) Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

(1) Potongan harga

(2) Rabat dan lainnya yang serupa.

(3) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

c) Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.

6) Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:

a) Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:

(1) Alat gelas yang masih ada di gudang

(2) Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan

(3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik.

b) Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:

(1) Alat gelas yang masih ada di gudang,

(2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan

7) Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	*2 s.d. 20 tahun*
Gedung dan Bangunan	*10 s.d. 50 tahun*
Jalan, Jaringan dan Irigasi	*5 s.d 40 tahun*
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	*4 tahun*

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lain-Lain

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Besar POM di Makassar memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.103.863,00 Selama periode tahun 2023 Balai Besar POM di Makassar telah melakukan revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun sebanyak 9 (Sembilan) kali perubahan. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut :

1. DIPA Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2022 dilakukan pemblokiran mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (Automatic Adjusment) TA 2023
2. DIPA Revisi ke-2 tanggal 16 Februari 2023 dilakukan revisi dalam rangka Penyesuaian RPD TW I.
3. DIPA Revisi ke-3 tanggal 17 April 2023 dilakukan revisi dalam rangka Penyesuaian RPD TW II.
4. DIPA Revisi Ke-4 tanggal 20 Juni 2023 dilakukan revisi dalam rangka Pergeseran anggaran antar satuan kerja.
5. DIPA Revisi Ke-5 tanggal 14 Juli 2023 dilakukan revisi dalam rangka pembukaan blokir anggaran Automatic Adjustment TA 2023
6. DIPA Revisi Ke-6 tanggal 22 Juli 2023 dilakukan revisi dalam rangka pembukaan blokir anggaran Automatic Adjustment TA 2023
7. DIPA Revisi Ke-7 tanggal 31 Agustus 2023 dilakukan revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar satker dalam rangka pemberlakuan konsep regional laboratorium dan pemenuhan anggaran pelaksana tugas dan fungsi unit kerja Badan POM.
8. DIPA Revisi Ke-8 tanggal 17 Oktober 2023 dilakukan revisi dalam rangka memenuhi kebutuhan kekurangan belanja pegawai.
9. DIPA Revisi Ke-9 tanggal 07 Desember 2023 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran ke belanja modal.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Rincian Perubahan DIPA TA 2023

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan			
Pendapatan PNBP	408,885,000	408,885,000	0
Jumlah Pendapatan	**408,885,000**	**408,885,000**	**0**
Belanja			
Belanja Pegawai	20,440,800,000	18,587,496,000	(1,853,304,000)
Belanja Barang	31,673,898,000	27,818,929,000	(3,854,969,000)
Belanja Modal	8,989,165,000	9,099,685,000	110,520,000
Jumlah Belanja	**61,103,863,000**	**55,506,110,000**	**(5,597,753,000)**

Realisasi Pendapatan Rp943.660.200,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp943.660.200,00 atau mencapai 231% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp408.885.000,00 Pendapatan Balai Besar POM di Makassar terdiri dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan dan Penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023
(Dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	408,885,000	904,920,000	221%
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	13,353,559	100%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	19,913,312	100%
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	2,973,329	100%
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	-	2,500,000	100%
Jumlah	**408,885,000**	**943,660,200**	**231%**

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,32% dibandingkan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru terkait pengakuan PNBP Fungsional Jasa

Pengawasan Obat dan Makanan yang sebelumnya diakui secara terpusat namun pada tahun 2022 diakui oleh Unit Pelaksana Teknis Balai. Berikut perbandingan realisasi pendapatan 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	904.920.000	671.475.000	34,77%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	13.353.559	10.978.343	21,64%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	19.913.312	126.299.999	(84,23%)
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	2.973.329	21.487.496	(86,16%)
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	2.500.000	3.391.000	(26,28%)
Penerimaan kembali belanja modal TAYL	-	21.726.884	N/A
Jumlah	**943.660.200**	**855.358.722**	**10,32%**

Rincian Realisasi Pendapatan berupa :

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp904.920.000,00 terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1	Jasa Pengujian	893,020,000
2	Jasa Sertifikasi	11,900,000
	Total Pendapatan	**904,920,000**

- Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp.13.353.559,00 terdiri dari:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian Kelebihan Belanja Uang Makan Bulan Desember 2022	C1F747QLUFPQEAR0	31-May-23	7.784.350
2	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2022	71F6A1JNFLP3J6KJN	31-May-23	944.909
3	Pengembalian belanja pegawai berupa Gaji Desember TA 2022 a.n Burhan, S.Si., Apt karena meninggal dunia	784570N9VRBV3F02	07-Jul-23	4.624.300
	Total Pendapatan			**13.353.559**

- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp19.913.312,00 terdiri dari :

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pendapatan dari hasil lelang peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat	E49CD7QLUG5FA5VQ	22-Sep-23	13.599.999
2	Pendapatan dari hasil lelang peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat	172CE48VV5V50A4S	30 Oktober 2023	6.313.313
	Total Pendapatan			**19.913.312**

- Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp2.973.329,00 terdiri dari :

No	Uraian	No.NTPN/SP2D	Tanggal Setor	Nilai
1	Denda keterlambatan pengadaan suku cadang (Wiralab)	231361302006467	4-Jul-23	12,973
2	Denda keterlambatan pengadaan perlengkapan Peserta Kegiatan KIE	231361302006928	17-Jul-23	753,149
3	Denda keterlambatan pengadaan alat laboratorium	231361302011633	16-Nov-23	2,207,207
	Total Pendapatan			**2,973,329**

- Pendapatan atas penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari pengembalian biaya sewa kendaraan dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti terkait Operasi Penindakan dengan Nomor NTPN 5FFBA1JNFM210QND tanggal 30 Agustus 2023

Realisasi Belanja Rp55.081.318.876,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.081.318.876,00 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp55.506.110.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

NO	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	18.587.496.000	18.566.888.503	99,89%
2	Belanja Barang	27.818.929.000	27.449.910.367	98,67%
3	Belanja Modal	9.099.685.000	9.093.194.062	99,93%
	Total Belanja Kotor	**55.506.110.000**	**55.109.992.932**	**99,29%**
	Pengembalian	0	28.674.056	N/A
	Total Belanja Bersih	**55.506.110.000**	**55.081.318.876**	**99,23%**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

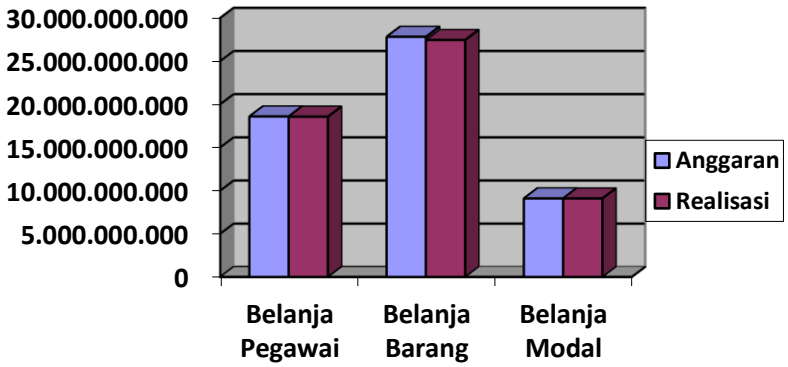

Dibandingkan dengan 31 Desember 2022, Realisasi Belanja 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,75%. Peningkatan persentase kenaikan terbesar terjadi pada belanja barang yang mencapai 14,69%, sedangkan Belanja Pegawai mengalami penurunan 5,79% dan Belanja Modal juga mengalami penurunan hingga 9,01%. Hal ini disebabkan antara lain :

- Meningkatnya belanja barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.
- Menurunnya belanja pegawai disebabkan adanya beberapa pegawai yang pensiun dan mutasi satuan kerja.
- Menurunnya belanja modal karena dibatasinya pagu terhadap belanja modal pada tahun anggaran 2023.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	18.541.394.447	19.680.877.443	(5,79%)
Belanja Barang	27.446.730.367	23.931.035.467	14,69%
Belanja Modal	9.093.194.062	9.994.022.172	(9,01%)
Jumlah	**55.081.318.876**	**53.605.935.082**	**2,75%**

Realisasi Belanja Pegawai Rp18.541.394.447,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.541.394.447,00 dan Rp19.680.887.443,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.678.145.081	9.201.568.768	(5,69%)
Belanja Lembur	13.138.000	55.393.000	(76,28%)
Belanja Tunjangan Khusus	9.875.605.422	10.425.036.063	(5,27%)
Jumlah Belanja Kotor	**18.566.888.503**	**19.681.997.831**	**(5,67%)**
Pengembalian Belanja Pegawai	(25.494.056)	(1.110.388)	2195,96%
Jumlah Belanja	**18.541.394.447**	**19.680.887.443**	**(5,79%)**

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 5,79% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022. Penurunan belanja pegawai tersebut diantaranya terjadi karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi satuan kerja di Tahun Anggaran 2023. Pengembalian belanja pegawai Balai Besar POM di Makassar selama periode 1 Januari – 31 Desember 2023 sebesar Rp25.494.056,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	No.NTPN/SP2D	Tanggal	Nilai
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji	231361302000045	16-Jan-23	51
	231361302000717	20-Feb-23	24
	231361302002743	05-Apr-23	122
	231361302004974	17-May-23	110
	231361302006052	19-Jun-23	48
	231361302006969	17-Jul-23	150
	231361302011513	13-Nov-23	131
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	4FE5A6QRA6PL86KV	30-Aug-23	455.750
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum	231361302006027	16-Jun-23	185.000
	231361302006052	19-Jun-23	185.000
	231361302006969	17-Jul-23	1.665.000
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	FF28B45IQN2GJ2UA	30-Aug-23	899.997
	3DECF7NAMJNACSTO	13-Dec-23	2.757.090
	137C045KN9DOOS7A	13-Dec-23	4.687.054
	F98441GC7PMJHSR7	13-Dec-23	4.549.199
	9194A6QT6P6DMG9L	18-Dec-23	10.109.330
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai			**25.494.056**

Realisasi Belanja Barang Rp27.446.730.367,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.446.730.367,00 dan Rp23.931.035.467,00. Adapun rincian belanja barang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.505.109.513	2.619.998.573	(4,39%)
Belanja Barang Non Operasional	3.363.809.157	3.026.146.063	11,16%
Belanja Barang Persediaan dan Barang Konsumsi	3.213.532.088	2.816.932.107	14,08%
Belanja Jasa	3.619.145.162	3.173.269.816	14,05%
Belanja Pemeliharaan	2.547.629.521	2.087.466.706	22,04%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12.200.684.926	10.209.439.702	19,50%
Jumlah Belanja Kotor	**27.449.910.367**	**23.933.252.967**	**14,69%**
Pengembalian Belanja	(3.180.000)	(2.217.500)	43,40%
Jumlah Belanja	**27.446.730.367**	**23.931.035.467**	**14,69%**

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami peningkatan 14,69% terhadap Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan, antara lain :

1. Peningkatan belanja barang persediaan dan barang konsumsi disebabkan peningkatan produktivits pegawai Balai Besar POM di Makassar.
2. Peningkatan belanja perjalanan dalam negeri disebabkan karena telah dicabut status Pandemi COVID-19 menjadi Endemi sehingga meningkatnya kegiatan-kegiatan menjadi luring.
3. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama

Pengembalian belanja Barang Balai Besar POM di Makassar selama periode 1 Januari – 31 Desember 2023 sebesar Rp3.180.000,00 antara lain:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengemb. Belanja Perjalanan Dinas Transport dan UH Fullday Meeting Kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP tanggal 8-9 Feb 2023	D50D445IQMG1AER6	14-Feb-23	1.020.000
2	Pengemb. Belanja Perjalanan Dinas Keg.Fullday Meeting Bimtek SNI ISO 37001 2016	21E481GAB6PBMA7H	28-Feb-23	975.000
3	Pengemb. Belanja Perjalanan Dinas Keg.Fullday Meeting Bimtek Internal SNI ISO IEC 17025 2017	D06DD1GAB6PC3Q6B	20-Feb-23	1.185.000
Total Pendapatan				**3.180.000**

Belanja Modal Rp9.093.194.062,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.093.194.062,00 dan Rp9.994.022.172,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.093.194.062	9.833.334.472	(7,53%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	34.687.700	(100,00%)
Belanja Modal Tanah	0	126.000.000	(100,00%)
Jumlah Belanja Kotor	**9.093.194.062**	**9.994.022.172**	(9,01%)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**9.093.194.062**	**9.994.022.172**	**(9,01%)**

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan yakni sebesar 9,01% dibandingkan pada 31 Desember 2022. Penurunan belanja terjadi karena keterbatasan pagu yang ada pada pembagian belanja modal tahun anggaran 2023.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp9.093.194.062,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.093.194.062,00, mengalami penurunan sebesar 7,53% bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022 sebesar Rp9.833.334.472,00. Hal ini disebabkan oleh anggaran pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan operasional sehari-hari perkantoran dibatasi sehingga pembagian pagu tidak sebanyak besar pagu TA 2022. Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
Alat Laboratorium	8.896.366.637	9.277.869.152	(4,11%)
Alat Pengolah Data	127.700.000	123.427.020	3,46%
Peralatan & Fasilitas Perkantoran	69.127.425	136.269.300	(49,27%)
Alat Angkutan Darat Bermotor		295.769.000	100,00%
Jumlah Belanja Kotor	**9.093.194.062**	**9.833.334.472**	**(7,53%)**
Pengembalian Belanja Modal	**-**	**-**	**-**
Jumlah Belanja Modal	**9.093.194.062**	**9.833.334.472**	**(7,53%)**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset lancar Rp 6.145.969.319,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.145.969.319,00 dan Rp6.342.942.204,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera di direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan Rp 6.145.969.319,00

C.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.145.969.319,00 dan Rp6.342.942.204,00. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	2023	2022
Barang Konsumsi	865.380.796	861.142.986
Barang untuk Pemeliharaan	24.863.582	8.868.983
Suku Cadang	2.144.702.488	2.012.552.043
Bahan Baku	3.111.022.453	3.460.378.192
Jumlah	**6.145.969.319**	**6.342.942.204**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Saldo persediaan tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.10.20A.20A1.01.24.04 tanggal 31 Desember 2023. Persediaan dalam kondisi rusak senilai Rp. 0,00 dan Persediaan dalam kondisi usang senilai Rp. 0,00.

Aset Tetap Rp96.953.499.135,00

C.2 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp96.953.499.135,00 dan Rp85.796.717.966,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp37.457.820.000,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar POM di Makassar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.457.820.000,00 dan Rp37.457.820.000. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2023
(Dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	**37,457,820,000**
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	**37,457,820,000**
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**37,457,820,000**

Tanah seluas 9.662 m2 dengan nilai Rp37.457.820.000 terletak di Jln. Baji Minasa No. 2 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 20001 a.n. Pemerintah RI Cq. Badan POM RI.

Peralatan dan Mesin Rp 109.533.991.596,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp109.533.991.596,00 dan Rp89.432.103.947,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 15
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**89.432.103.947**
Mutasi tambah:	**24.357.693.812**
Saldo Awal	126.250.000
Pembelian	8.480.125.396
Transfer Masuk	14.715.237.178
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	613.068.666
Reklasifikasi Masuk	423.012.572
Mutasi kurang:	**(4.255.806.163)**
Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.795.543.591)
Koreksi Pencatatan	(126.250.000)
Transfer Keluar	(911.000.000)
Reklasifikasi Keluar	(423.012.572)
Saldo per 31 Desember 2023	**109.533.991.596**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(68.067.569.431)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**41.466.422.165**

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebagai berikut:

- Saldo awal sebesar Rp126.250.000,00. Nilai tersebut diperoleh dari hasil koreksi pencatatan aset gabungan dengan nomor dokumen PL.03.01.26A.26A5.06.23.211 tanggal 21 Juni 2023. Koreksi dilakukan karena pada TA 2022 ada alat laboratorium yang komponen barangnya tidak terinci di kontrak jadi tercatat sebagai aset gabungan. Sehingga dilakukan koreksi agar aset-aset yang tadinya dicatat secara gabungan bisa dicatat masing-masing sesuai dengan fisiknya.

NO	Nama Barang	Nilai Aset	Kode Barang/NUP	Keterangan
1	Transformer	7.500.000	3080203087/4	Surat Keterangan PL.03.01.26A.26A5.06.23.211 Tanggal 21 Juni 2023
2	Uninterupted Power Supply (UPS)	64.000.000	3080305002/18	
3	Stabilizer/UPS	8.150.000	3080141251/29	
4	P.C Unit	17.700.000	3100102001/17	
5	Uninterupted Power Supply (UPS)	4.200.000	3080305002/17	
6	Uninterupted Power Supply (UPS)	18.000.000	3080305002/19	
7	Transformer	4.000.000	3080203087/4	
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.700.000	3100203003/198	
TOTAL		126.250.000		

- Pembelian Peralatan dan Mesin senilai Rp. 8.480.125.396 terdiri dari:

No	Uraian	Kode Barang	Nilai	Tanggal Perolehan
1	Autoclave Unit	3080111115	116.000.000	15-Sep-23
2	Test Tube Dry Bath	3080203031	76.208.000	18-Aug-23
3	UPS	3080305002	6.025.000	10-Aug-23
4	Hot Plate	3080113034	5.460.000	10-Aug-23
5	Micro Pippettes	3080112073	6.851.650	08-Aug-23
6	Laminar Air Flow Cabinet	3080146024	5.168.865.000	10-Aug-23
7	A.C. Split	3050204004	4.650.000	10-Aug-23
8	Centrifuge	3080111001	10.501.821	12-Dec-23
9	A.C. Split	3050204004	25.327.425	15-Dec-23
10	Lap Top	3100102002	25.000.000	12-Dec-23
11	P.C Unit	3100102001	60.000.000	28-Dec-23
12	Router	3100204002	11.800.000	28-Dec-23
13	Filing Cabinet Besi	3050104005	23.800.000	28-Dec-23
14	Lap Top	3100102002	15.900.000	18-Jul-23
15	A.C. Split	3050204004	20.000.000	29-Mar-23
16	Scanner	3100203004	6.300.000	20-Mar-23
17	Printer	3100203003	8.700.000	20-Mar-23
18	Transformer	3080203087	15.000.000	25-May-23
19	P.C Unit	3100102001	18.700.000	25-May-23
20	High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)	3080141122	1.639.000.000	25-May-23
21	Printer	3100203003	2.300.000	25-May-23
22	UPS	3080305002	24.000.000	25-May-23
23	Ultrasonic Cleaner	3080605033	148.675.000	16-Nov-23
24	A.C. Split	3050204004	47.979.750	14-Nov-23
25	Liquid Dispenser	3080146027	40.879.840	04-Dec-23
26	Micro Pippettes	3080112073	46.967.600	20-Nov-23
27	Waterbath With Thermostat	3080115050	70.000.000	16-Nov-23
28	Transformer	3080203087	67.883.310	18-Oct-23
29	Dehumidifier	3080141058	77.351.000	31-Oct-23
30	UPS	3080305002	6.145.800	13-Sep-23
31	Laminar Air Flow Cabinet	3080146024	683.854.200	13-Sep-23
	Total Pembelian		8.480.125.396	

- Transfer Masuk senilai Rp. 14.715.237.178,00 terdiri dari:

No	Uraian	Kode Barang	Nilai	Satker Asal	Dokumen & Tanggal
1	Spectrophotometer	3080111138	428.155.800	BBPOM DI JAYAPURA	B-PL.03.07.30A.30A5.09. 23.983 Tanggal 20 September 2023
2	P.C Unit	3100102001	2.880.000		
3	Ion Chromatography	3080141251	1.838.830.017		B-PL.03.07.30A.30A5.10 .23.491 Tanggal 05 Oktober 2023
4	P.C Unit	3100102001	16.701.031		
5	Teropong /Keker	3060105037	24.950.000	DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	PL.03.03.61.616.11.23.0686 Tanggal 13 November 2023
6	Camera Digital	3060102128	21.900.000		
7	Camera Video	3050206020	8.400.000		
8	Drone	3060102167	45.000.510		
9	Telephone Mobile	3060201004	15.719.820		
10	LCMS-MS	3080141122	5.820.300.000	BPOM DI AMBON	B-PL.02.03.29A.29A5.12.23.235 Tanggal 04 Desember 2023
11	Nitrogen Generator	3080205001	240.000.000		
12	Tabung Gas Argon UHP	3080111223	11.000.000		
13	UPS	3060101048	1.700.000		
14	UPS	3060101048	126.500.000		
15	Isolation Transformer	3080305005	33.000.000		
16	Vacuum Pump	3080111028	21.300.000		
17	Printer (PeralatanPerson	3100203003	3.900.000		
18	Monitor	3100203002	5.000.000		
19	P.C Unit	3100102001	239.000.000		
20	HPLC	3080141122	4.813.975.000	BPOM DI KENDARI	B-PL.03.07.27Q.17A5.12.23.302 Tanggal 01 Desember 2023
21	UPS	3060101048	47.841.000		
22	P.C Unit	3100102001	33.966.000		
22	Printer (PeralatanPerson	3100203003	4.218.000		
23	Mobil Incinerator	3020102003	911.000.000		PL.03.03.6B.6B1.12.2023.316 Tanggal 31 Desember 2023
	Total Transfer Masuk		14.715.237.178		

- Penyelesaian dengan KDP senilai Rp. 613.068.666,00 berupa:

No.	No. Kontrak	Uraian	Tanggal SP2D	Nilai
1	PLS/PPK-2/03/23/04	Pengadaan alat Lab. TA 2023	13-Sep-23	613.068.666
Total				**613.068.666**

- Reklasifikasi Masuk senilai Rp. 423.012.572,00 dilakukan karena adanya kesalahan kodefikasi BMN, maka kepada pengelola BMN untuk melakukan koreksi pencatatan berupa reklas kodefikasi yang salah. Adapun rincian Reklasifikasi masuk terdiri dari:

No.	Uraian	No. Dokumen	Nama Barang	Kode	Nilai
1	Perbaikan Pencatatan TM dari Deputi IV	B-PL.03.01.61.615. 12.23.742 Tanggal 04 Desember 2023	Teropong /Keker	3060105037	24.950.000
			Camera Digital	3060102128	21.900.000
			Camera Video	3050206020	8.400.000
2	Perbaikan Kode Barang yang tidak tepat	PL.03.01.20A.20A1.12 .23.388 Tanggal 31 Desember 2023	Waste Water Purification	3080140005	367.762.572
TOTAL					423.012.572

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin berasal dari :

- Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp. 2.795.543.591,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	No. & Tgl Dokumen	Uraian	Nilai Aset
1	SK Penghentian Aset dari Penggunaan	PL.03.09.26A.26A5.09.22.4231 Tanggal 30 September 2023	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	251.240.000
2	SK Penghentian Aset dari Penggunaan	PL.03.09.26A.26A5.08.23.230 Tanggal 01 Agustus 2023	Peralatan dan Mesin	637.452.686
3	SK Penghentian Aset dari Penggunaan	PL.03.09.26A.26A5.08.23.230a Tanggal 01 Agustus 2023	Peralatan dan Mesin	1.906.850.905
Total				2.795.543.591

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp. 126.250.000,00 terdiri dari:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	No. dan Tanggal Dokumen	Nilai
1	3010305012	Water Purification	001	PL.03.01.26A.26A5.06.23.211, Tanggal 21 Juni 2023	4.200.000
2	3080141017	Atomic Absorption	007	PL.03.01.26A.26A5.06.23.211, Tanggal 21 Juni 2023	113.900.000
3	3080141170	Microwave Oven	009	PL.03.01.26A.26A5.06.23.211, Tanggal 21 Juni 2023	8.150.000
TOTAL					126.250.000

Koreksi pencatatan Nilai Berkurang karena pada TA 2022 terdapat alat laboratorium yang tercatat sebagai aset gabungan, sehingga dilakukan koreksi agar aset-aset yang tadinya dicatat secara gabungan bisa dicatat masing-masing secara terpisah.

- Transfer Keluar sebesar Rp. 911.000.000,00 berupa Mobil Incinerator ke Balai POM di Kendari dengan No. BAST : PL.03.07.26A.26A5.12.23.662 tanggal 31 Desember 2023
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp. 423.012.572,00 dilakukan karena adanya kesalahan kodefikasi BMN dari Deputi IV, maka kepada pengelola BMN untuk melakukan koreksi pencatatan berupa reklas kodefikasi yang salah. Adapun rincian Reklasifikasi keluar terdiri dari:

No.	Uraian	No. Dokumen	Nama Barang	Kode	Nilai
1	Perbaikan Pencatatan TM dari Deputi IV	B-PL.03.01.61.615.12.23.742 Tanggal 04 Desember 2023	Teropong /Keker	3060105037	24.950.000
			Camera Digital	3060102128	21.900.000
			Camera Video	3050206020	8.400.000
2	Perbaikan Kode Barang yang tidak tepat	PL.03.01.20A.20A1.12.23.388 Tanggal 31 Desember 2023	Waste Water Purification	3080140005	367.762.572
TOTAL					423.012.572

Selain hal tersebut di atas, terdapat informasi yang akan ditambahkan terkait kepemilikan senjata api pada Balai Besar POM di Makassar sebagai berikut:

a. Nama Barang : Pistol
b. Merek : Fegarmi
c. NUP : 1
d. Nomor Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet : BPSPK/199.a/XII/2009
e. Tanggal Perolehan : 16 Desember 2003
f. Masa Berlaku Izin : 19 Januari 2010 s.d. 30 Desember 2014
g. Lokasi Penyimpanan Senjata Api : Polda Sulawesi Selatan

Gedung dan Bangunan Rp 20.545.394.998,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp20.545.394.998 dan Rp20.545.394.998,00. Tidak terdapat mutasi transaksi gedung dan bangunan.

Tabel 16
Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**20.545.394.998**
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2023	**20.545.394.998**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3.164.647.427)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**17.380.747.571**

Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 463.074.700,00

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp463.074.700 dan Rp463.074.700,00. Tidak terdapat mutasi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode ini..

Tabel 17
Mutasi Jalan, Irigasi, jaringan per 31 Desember 2023

Jaringan	**463.074.700**
Saldo 31 Desember 2022	463.074.700
- Mutasi Tambah	-
- Mutasi Kurang	-
Saldo 31 Desember 2023	463.074.700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(124.395.401)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	338.679.299
Jumlah Total Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**463.074.700**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**(124.395.401)**
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**338.679.299**

Aset Tetap Lainnya Rp309.830.100,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp309.830.100,00 dan Rp309.830.100,00. Aset Tetap Lainnya terdiri atas Monografi senilai Rp241.162.100,00 dan Buku Lainnya senilai Rp68.668.000,00. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**309.830.100**
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2023	**309.830.100**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**309.830.100**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp71.356.612.259 ,00

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp71.356.612.259,00 dan Rp62.411.505.779,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

:

Tabel 19
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	37.457.820.000		37.457.820.000
2	Peralatan dan Mesin	109.533.991.596	68.067.569.431	41.466.422.165
3	Gedung dan Bangunan	20.545.394.998	3.164.647.427	17.380.747.571
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	463.074.700	124.395.401	338.679.299
5	Aset Tetap Lainnya	309.830.100	0	309.830.100
Jumlah		**168.310.111.394**	**71.356.612.259**	**96.953.499.135**

Aset Lainnya Rp120.146.951,00

C.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp120.146.951,00 dan Rp2.062.500,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp5.500.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 20
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023
(Dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**5.500.000**
Mutasi Tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Penghentian aset dari penggunaan	(5.500.000)
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Aset Tak Berwujud pada Balai Besar POM di Makassar berupa software berbasis web bernama "ADA JA" yang pada awalnya digunakan untuk absensi WFH sebelum adanya absensi E-Presensi kemudian beralih menjadi aplikasi dalam rangka pemantauan keberadaan pegawai ketika melakukan perjalanan dinas luar kota. Aplikasi tersebut per 31 Desember 2023 telah dihentikan dari penggunaan karena tidak digunakan lagi dan sudah dihapuskan berdasarkan SK Penghentian Aset dari Penggunaan No. PL.03.09.26A.26A5.07.23.223 tanggal 18 Juli 2023.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp120.146.951,00

C.3.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo atas Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 120.146.951,00 dan Rp. 0,00. Dana yang Dibatasi Penggunaannya digunakan untuk mencatat Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga. Adapun rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023

No	Uraian	No. BAST	Tanggal BAST	Nilai
1	Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan	PL.02.01.26A.26A5.12.23.660	31-Des-2023	36.533.700
2	Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan	PL.02.01.26A.26A5.12.23.661	31-Des-2023	49.274.181
3	Jasa Outsourcing Tenaga Alih Daya	PL.02.01.26A.26A5.12.23.662	31-Des-2023	34.339.070
Jumlah		**0**	**0**	**120.146.951**

Berdasarkan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

Aset Lain-lain Rp0,00

C.3.3 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp471.216.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Mutasi Aset Lain- Lain per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**471.216.000**
Mutasi Tambah :	**2.803.298.591**
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	**2.803.298.591**
Mutasi Kurang :	**(3.274.514.591)**
Usulan Barang RB ke Pengelola	**(3.274.514.591)**
Saldo per 31 Desember 2023	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**0**

Mutasi tambah Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp. 2.803.298.591,00 yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NO DOKUMEN	Tanggal	Uraian	NILAI ASSET
1	SK Penghentian Aset dari Penggunaan	PL.03.09.26A.26A5.09.22.4231	30-Sep-22	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	251,240,000
2	SK Penghentian Aset dari Penggunaan	PL.03.09.26A.26A5.07.23.230	1 Agustus 2023	Peralatan dan Mesin	639,707,686
3	SK Penghentian Aset dari Penggunaan	PL.03.09.26A.26A5.07.23.230a	1 Agustus 2023	Peralatan dan Mesin	1,906,850,905
4	SK Penghentian Aset dari Penggunaan	PL.03.09.26A.26A5.07.23.223	18 Juli 2023	Software	5,500,000
Total					2,803,298,591

Mutasi kurang Aset Lain-lain berupa Usulan Barang RB ke Pengelola sebesar Rp. 3.274.514.591,00 merupakan pencatatan barang yang akan dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NO DOKUMEN	Tanggal	Uraian	NILAI ASSET
1	SK Penghapusan	B-PL.03.09.26A.26A5.09.23.296	29-Sep-22	Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat	639.707.686
2	SK Penghapusan	B-PL.03.09.26A.26A5.11.23.361	22-Nov-23	Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat	2.378.066.905
3	SK Penghapusan	B-PL.03.09.26A.26A5.08.23.267	23-Nov-23	Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat	5.500.000
4	SK Penghapusan	PL.03.09.26a.26A52.11.22.475a	16 Desember 2023	Mini Bus	251.240.000
Total					**3.274.514.591**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0,00

C.3.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp474.653.500,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban jangka pendek Rp236.248.299,00

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp236.248.299,00 dan Rp92.902.066,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp236.248.299,00

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp236.248.299,00 dan Rp92.902.066,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Besar POM di Makassar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023		2022	
1	Belanja Pegawai YMH Dibayar	Rp	17.658.560,00	Rp	707.084,00
2	Belanja Barang YMH Dibayar	Rp	98.442.788,00	Rp	92.194.982,00
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp	120.146.951,00	Rp	-
	Total	**Rp**	**236.248.299,00**	**Rp**	**92.902.066,00**

- Belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp. 17.658.560,00 merupakan pembayaran atas Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja bulan Desember 2023 untuk dua orang pegawai yang baru dibayarkan bulan Januari 2024.
- Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp. 98.442.788,00 terdiri atas :

No	Uraian	2023	
1	Langganan Listrik Desember 2023	Rp	91.092.320,00
2	Langganan PDAM Desember 2023	Rp	4.898.690,00
3	Langganan Telpon Desember 2023	Rp	2.451.778,00
	Total Pengembalian	**Rp**	**98.442.788,00**

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp. 120.146.951,00 merupakan utang atas Belanja Jasa Outsourcing Periode Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 secara RPATA yang terdiri atas:

No	Uraian	Nilai
1	Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan	36.533.700
2	Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan	49.274.181
3	Jasa Outsourcing Tenaga Alih Daya	34.339.070
Jumlah		**120.146.951**

Ekuitas Rp 102.983.367.106,00

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp102.983.367.106,00 dan Rp92.048.820.604,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak Rp907.893.329,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp907.893.329,00 dan Rp692.962.496,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 24
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	904.920.000	671.475.000	34,77%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.973.329	21.487.496	(63,95%)
Jumlah	**907.893.329**	**692.962.496**	**31,02%**

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan berasal dari Jasa Pengujian dan Jasa Sertifikasi sebesar Rp904.920.000,00 dan Pendapatan Denda Keterlambatan sebesar Rp2.973.329,00 yang terdiri atas:

No	Uraian	No.NTPN/SP2D	Tanggal Setor	Nilai
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Jasa Pengujian			893,020,000
2	Jasa Sertifikasi			11,900,000
Total				**904,920,000**
Pendapatan Denda				
1	Denda keterlambatan pengadaan suku cadang (Wiralab)	231361302006467	4-Jul-23	12,973
2	Denda keterlambatan pengadaan perlengkapan Peserta Kegiatan KIE	231361302006928	17-Jul-23	753,149
3	Denda keterlambatan pengadaan alat laboratorium	231361302011633	16-Nov-23	2,207,207
Total				**2,973,329**
Total Pendapatan				**907,893,329**

Beban Pegawai Rp18.558.345.923,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.558.345.923,00 dan Rp19.681.584.527,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 25
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	7.988.928.611	8.446.800.464	(5,42%)
Beban Lembur	13.138.000	55.393.000	(76,28%)
Beban Uang Makan	686.018.000	754.355.000	(9,06%)
Beban Tunjangan Khusus	9.870.261.312	10.425.036.063	(5,32%)
Jumlah	**18.558.345.923**	**19.681.584.527**	**(5,71%)**

Beban Persediaan Rp3.346.517.455,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.346.517.455,00 dan Rp2.553.912.527,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.300.547.667	866.436.482	50,10%
Beban Persediaan Bahan Baku	2.045.969.788	1.687.476.045	21,24%
Jumlah	**3.346.517.455**	**2.553.912.527**	**31,03%**

Beban Barang dan Jasa Rp9.494.311.638,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.494.311.638,00 dan Rp8.844.550.833,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.991.386.839	1.909.744.382	4,28%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	234.002.000	240.020.755	(2,51%)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	20.378.724	21.291.738	(4,29%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	198.064.000	202.340.000	(2,11%)
Beban Barang Operasional Lainnya	61.277.950	22.454.480	172,90%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	235.535.218	N/A
Beban Bahan	2.764.668.303	2.033.981.132	35,92%
Beban Honor Output Kegiatan	303.850.000	541.342.500	(43,87%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	214.271.824	365.713.689	(41,41%)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	81.019.030	46.813.472	73,07%
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	26.099.770	N/A
Beban Langganan Listrik	1.086.206.382	967.277.342	12,30%
Beban Langganan Telepon	29.545.929	29.672.080	(0,43%)
Beban Langganan Air	53.456.110	36.589.050	46,10%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	115.434.581	N/A
Beban Sewa	534.397.800	442.283.655	20,83%
Beban Jasa Profesi	468.100.000	636.650.000	(26,47%)
Beban Jasa Lainnya	1.453.686.747	952.884.599	52,56%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	16.582.390	N/A
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	1.840.000	N/A
Jumlah	**9.494.311.638**	**8.844.550.833**	**7,35%**

Beban Pemeliharaan Rp2.586.103.077,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.586.103.077,00 dan Rp2.086.073.802,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan disebabkan oleh menurunnya beban untuk pemeliharaan belanja Modal Peralatan dan Mesin diikuti oleh penurunan beban untuk pemeliharaan dan beban persediaan suku cadang. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	440.177.964	351.824.902	25,11%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.031.469.156	887.898.836	16,17%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	31.642.330	33.549.222	(5,68%)
Beban Persediaan Suku Cadang	1.082.813.627	812.800.842	33,22%
Jumlah	**2.586.103.077**	**2.086.073.802**	**23,97%**

Beban Perjalanan Dinas Rp12.197.504.926,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.197.504.926,00 dan Rp10.208.029.702,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas paket meeting dalam yang meningkat untuk mendukung tupoksi Balai Besar POM di Makassar. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.257.022.873	5.126.375.798	(36,47%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.310.000	2.951.250.000	(84,74%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.661.869.114	850.432.933	330,59%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(3.180.000)	(1.410.000)	125,53%
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.800.000	N/A
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.831.482.939	1.279.580.971	277,58%
Jumlah	**12.197.504.926**	**10.208.029.702**	**19,49**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp8.829.328.044,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.829.328.044,00 dan Rp7.887.396.661,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.308.318.803	7.344.557.771	13,12%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	506.789.844	504.371.193	0,48%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	13.531.897	13.531.897	0,00%
Jumlah Penyusutan	**8.828.640.544**	**7.862.460.861**	**12,29%**
Beban Amortisasi Software	687.500	1.375.000	(50,00%)
Beban Penyusutan aset lain-lain	0	23.560.800	N/A
Jumlah Amortisasi	**687.500**	**24.935.800**	**(97,24%)**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**8.829.328.044**	**7.887.396.661**	**11,94%**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp275.996.129,00)

D.8 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pelepasan Aset Non Lancar	**(161.547.685)**	**126.299.999**	(227,91%)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	19.913.312	126.299.999	(84,23%)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	181.460.997	0	N/A
Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**15.853.559**	**77.986.313**	(79,67%)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	34.967.606	N/A
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.500.000	3.391.000	(26,28%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	13.353.559	10.978.343	21,64%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	3.680.000	N/A
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	24.969.364	N/A
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	**130.302.003**	**34.233.757**	280,62%
Beban Persediaan Rusak/Usang	130.302.003	34.233.757	280,62%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainn	**(114.448.444)**	**43.752.556**	**(361,58%)**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(275.996.129)**	**170.052.555**	**(262,30%)**

- Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya, terdiri dari:
  - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp. 19.913.312,00 terdiri dari:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai	Keterangan
1	Penjualan Peralatan Mesin	E49CD7QLUG5FA5VQ	22-Sep-23	13.599.999	No. RL-1242/72/2023, Tanggal 22 Sept 2023
2	Penjualan Peralatan Mesin	172CE48VV5V50A4S	30-Oct-23	6.313.313	No. RL-1426/72/2023, Tanggal 23 Okt 2023
	Total Pembelian			19.913.312	

  - Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp. 181.460.997,00 terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal Penghapusan	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Sisa Nilai Buku
1	Printer	25 Juli 2023	3.850.000	2.887.500	962.500
2	Software	01 Agustus 2023	5.500.000	4.125.000	1.375.000
3	Stabilizer / UPS	01 November 2023	151.934.714	94.959.197	56.975.517
4	Stabilizer / UPS	01 November 2023	224.607.316	140.379.571	84.227.745
5	Stabilizer / UPS	01 November 2023	101.120.625	63.200.390	37.920.235
	Total Pembelian		487.012.655	305.551.658	181.460.997

Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Aset Tetap yang akan dihapuskan namun masih menyisakan nilai buku pada Aset Tetap tersebut.

- Pendapatan atas penerimaan Kembali belanja barang TAYL sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari pengembalian biaya sewa kendaraan dalam penyerahan tersangka dan barang bukti terkait operasi penindakan dengan nomor NTPN 5FFBA1JNFM210QND tanggal 30 Agustus 2023
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp13.353.559,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian Kelebihan Belanja Uang Makan Bulan Desember 2022	C1F747QLUFPQEAR0	31-May-23	7.784.350
2	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2022	71F6A1JNFLP3J6KJN	31-May-23	944.909
3	Pengembalian belanja pegawai berupa Gaji Desember TA 2022 a.n Burhan, S.Si., Apt karena meninggal dunia	784570N9VRBV3F02	07-Jul-23	4.624.300
	Total Pendapatan			**13.353.559**

- Beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp130.302.003,00, terdiri dari Beban Persediaan Rusak/Usang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Nomor B-PL.03.09.26A.26A5.09.23.300 Tanggal 29 September 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Satker Balai Besar POM di Makassar.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp92.048.820.604,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp92.048.820.604 dan Rp88.740.310.762,00.

Surplus/(Defisit) LO Rp54.380.213.863,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp54.380.213.863,00 dan Rp 50.433.500.607,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp4.895.679,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp4.895.679,00 dan Rp233.751,00.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan 0,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp4.895.679,00

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.895.679,00 dan Rp21.493.133,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan akumulasi koreksi yang muncul akibat adanya koreksi pencatatan Saldo Awal yang berasal dari pencatatan aset gabungan dengan nomor dokumen PL.03.01.26A.26A5.06.23.211 tanggal 21 Juni 2023 dimana aset-aset yang sebelumnya dicatat secara gabungan menjadi dicatat masing-masing sesuai bentuk fisiknya.

Koreksi Lain-lain Rp0,00

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp65.309.864.686,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.309.864.686,00 dan Rp53.741.776.698,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 32
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	55.081.318.876
Diterima dari Entitas Lain	(943.660.200)
Transfer Keluar	(195.214.285)
Transfer Masuk	11.367.420.295
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	**65.309.864.686**

DDEL/DKEL (Rp943.660.200)/ Rp55.081.318.876

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp943.660.200,00) sedangkan DKEL sebesar Rp55.081.318.876,00.

Rincian DDEL dan DKEL sebagai berikut :

Tabel 33
Rincian DDEL dan DKEL per 31 Desember 2023
(Dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain terdiri dari	
Realisasi Belanja Pegawai	18,541,394,447
Realisasi Belanja Barang	27,446,730,367
Realisasi Belanja Modal	9,093,194,062
Jumlah DKEL	**55,081,318,876**
Di terima dari Entitas Lain terdiri dari	
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	904,920,000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	13,353,559
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2,500,000
Pendapatan dari Ppenjualan Peralatan dan Mesin	19,913,312
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2,973,329
Jumlah DDEL	**943,660,200**

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp11.367.420.295,00/ Rp195.214.285,00

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.367.420.295,00 yang merupakan transfer masuk bahan baku dari PPPOMN dan alat laboratorium dari beberapa Balai Besar/Balai POM dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Entitas Pengirim	No. BAST	Tanggal	Total
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.02.23.040A	07-Feb-23	3.622.820
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.05.02.10.104.02.23.046A	07-Feb-23	1.004.655
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.02.23.082A	15-Feb-23	2.916.900
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.02.23.093A	21-Feb-23	25.623.323
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.03.23.111A	08-Mar-23	733.400
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.05.02.10.104.03.23.129A	28-Mar-23	325.831
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.105.05.23.194A	24-May-23	1.314.248
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.105.05.23.182A	09-May-23	4.076.238
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.105.06.23.226A	22-Jun-23	1.480.208
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.105.07.23.259A	17-Jul-23	1.624.860
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.105.07.23.277A	31-Jul-23	4.030.204
Bahan Baku	PPPOMN	B-PP.03.02.27A.27A5.09.23.1072	15-Sep-23	51.699.000
Alat Laboratorium	BBPOM Jayapura	B-PL.03.07.30A.30A5.09.23.983	13-Sep-23	53.519.475
Bahan Baku	PPPOMN	PP.01.01.33A.33A5.10.156	13-10-2023	847.275
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.10.23.339A	09-10-2023	1.384.352
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.11.23.392A	22-11-2023	369.679
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.03.02.10.11.23.379A	09-11-2023	3.735.048
Alat Laboratorium	BBPOM Jayapura	B-PL.03.07.30A.30A5.10.23.491	05-Oct-23	229.853.753
Alat Laboratorium	Deputi Bidang Penindakan	PL.03.03.61.616.11.23.0686	13-Nov-23	111.470.279
Alat Laboratorium	BPOM Kendari	B-PL.03.07.27Q.17A5.12.23.302	01-Dec-23	4.589.569.462
Alat Laboratorium	BPOM Ambon	B-PL.02.03.29A.29A5.12.23.235	04-Dec-23	6.083.005.000
Mobil Incinerator	BPOM Kendari	PL.03.07.26A.26A5.12.23.662	31-Dec-23	195.214.285
Jumlah				**11.367.420.295**

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp195.214.285,00 (Nilai Buku) yang merupakan transfer masuk berupa Mobil Incinerator yang berasal dari Balai POM di Kendari dengan No. BAST PL.03.03.6B.6B1.12.2023.316 tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas Akhir Rp102.983.367.106,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp102.983.367.106,00 dan Rp92.048.820.604,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1. Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Makassar No. HK.02.02.26A.26A5.01.23.01 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pada Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker Balai Besar POM di Makassar telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Sebagai Berikut :

- Pejabat Pembuat Komitmen : Hamdana, S.Si
- Pejabat Pembuat Komitmen : Roni, SE
- Pejabat Pembuat Komitmen : Tri Astuty, ST
- Pejabat Penandatanganan SPM : Rita Sahari, SE
- Bendahara Pengeluaran : Amiruddin

Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 154 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar menunjuk Dra. Hariani, Apt sebagai Kepala Balai Besar POM di Makassar ditetapkan sebagai KPA terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023. Sehingga terjadi perubahan Kuasa Pengguna Anggaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

F.1.2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KP.06.01.1.24.05.23.2513 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Memutuskan penetapan Dra. Hariani, Apt sebagai Kepala Balai Besar POM di Makassar terhitung mulai tanggal 11 Mei 2023 menggantikan Plt Kepala Balai sebelumnya yang dijabat oleh Dra. Sriyani Rasyid, Apt.

F.1.3. Capaian Output Strategis

Hingga tanggal 31 Desember 2023, Output yang telah dicapai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai berikut:

Rincian Capaian Output Hingga 31 Desember TA 2023

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3.323.584.000	3.315.376.349	99,75%	1	1	99,75%
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM	254.342.000	29.254.312	11,50%	14	10	71,43%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	428.815.000	412.758.327	96,26%	613	619	100,98%
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BB/BPOM	93.917.999	87.560.000	93,23%	25	25	100,00%
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	8.598.850.000	8.564.364.998	99,60%	28.114	28.704	102,10%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.353.493.000	1.302.815.520	96,26%	1	1	100,00%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	76.415.000	76.340.540	99,90%	34	38	111,76%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	8.899.165.000	8.896.366.637	99,97%	1	1	97,00%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	69.800.000	69.127.425	99,04%	1	1	100,00%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	130.720.000	127.700.000	97,69%	7	11	157,14%
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM	996.630.000	942.413.668	94,56%	10	10	100,00%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	971.911.000	965.423.059	99,33%	98	98	100,00%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	847.722.000	839.133.815	98,99%	25	25	100,00%
3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	469.133.000	444.536.731	94,76%	17	17	100,00%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	822.291.000	814.639.129	99,07%	740	740	100,00%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	970.981.000	960.033.027	98,87%	1580	1582	100,13%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	53.596.000	48.389.083	90,28%	95	95	100,00%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	430.111.000	394.675.500	91,76%	188	199	105,85%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	1.924.216.000	1.895.510.022	98,51%	1129	1131	100,18%
3165.EBA.962	Layanan Umum	274.000.000	242.453.221	88,49%	1	1	100,00%
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	24.516.418.000	24.456.566.820	99,76%	1	1	99,76%

F.1.4. Alat Gelas Kualitatif

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/atau alat gelas yang berada di laboratorium namun belum digunakan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan

Makanan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan .

Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Balai Besar POM Makassar per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 17.951 unit, adapun rincian Alat Gelas terlampir.

F.1.5. Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM Makassar melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di Balai Besar POM Makassar pada tanggal per31 Desember 2023 sebagai berikut:

proses							
	OBAT	OBAT TRADISIONAL	KOSMETIK	PANGAN	SUPLEMEN KESEHATAN	MESIN/ALAT PRODUKSI	Lain-Lain
Proses SPDP/SPDP							
Tahap 1	4.240	56	4.096		11		
P-18/P-19							
P-21			1.067		3.039		
Tahap 2							
SP3							
TOTAL (pcs)	**4.240**	**56**	**5.163**	**0**	**3.050**	**0**	**0**

Lokasi penyimpanan barang bukti disimpan di Kantor Balai Besar POM di Makassar pada Gudang Barang Bukti Bidang Penindakan untuk perkara yang statusnya Proses SPDP sampai dengan P-21. Sedangkan pada

perkara yang sampai Tahap 2, barang buktinya sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan.

F.1.6. Pengungkapan Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari satu tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 Tema. Salah satu tema terdapat di Balai Besar POM di Makassar yaitu Upaya Konvergensi Penanganan Stunting dengan rincian sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	%	Satuan Ouput Strategis	Target	Capaian Ouput Strategis	Keterkaitan Dengan PN
Pasar aman dari bahan berbahaya	469.133.000	444.536.731	94,76%	Lembaga	17	17	PN
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	53.596.000	48.389.083	90,28%	Produk	95	95	PN
Desa Pangan Aman	847.722.000	839.133.815	98,99%	Lembaga	25	25	PN
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	8.598.850.000	8.564.364.998	99,60%	Orang	28.114	28.704	PN
Layanan Publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan oleh UPT	76.415.000	76.340.540	99,90%	Layanan	34	38	Non PN

F.1.7. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan Nasional	Pagu	Realisasi	%	Satuan Ouput Strategis	Target	Capaian Ouput Strategis	%
Pasar aman dari bahan berbahaya	469.133.000	444.536.731	94,76%	Lembaga	17	17	100,00%
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1.924.216.000	1.895.510.022	98,51%	Lembaga	1.129	1.131	100,18%
Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	8.899.165.000	8.896.366.637	99,97%	Paket	1	1	100,00%
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	53.596.000	48.389.083	90,28%	Produk	95	95	100,00%
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	970.981.000	960.033.027	98,87%	Produk	1.580	1.582	100,13%
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	430.111.000	394.675.500	91,76%	Lembaga	188	199	105,85%
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	93.917.000	87.560.000	93,23%	UMKM	25	25	100,00%
Desa Pangan Aman	847.722.000	839.133.815	98,99%	Lembaga	25	25	100,00%
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	8.598.850.000	8.564.364.998	99,60%	Orang	28.114	28.704	102,10%
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	971.911.000	965.423.059	99,33%	Lembaga	98	98	100,00%
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3.323.584.000	3.315.376.349	99,75%	Lembaga	1	1	100,00%
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	822.291.000	814.639.129	99,07%	Produk	740	740	100,00%
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar	996.630.000	942.413.668	94,56%	Perkara	10	10	100,00%

F.1.8. Transaksi RPATA

Pada Akhir Tahun Anggaran 2023 terdapat transaksi belanja yang dibayarkan melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourcing dengan rincian kontrak sebagai berikut:

No	Uraian	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nomor dan Tanggal BAST	Nilai
1	Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan	PL.02.01.26A.26A5.10.23.196, 31 Oktober 2023	PL.02.01.26A.26A5.12.23.660, 31 Desember 2023	36.533.700
2	Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan	PL.02.01.26A.26A5.10.23.197, 31 Oktober 2023	PL.02.01.26A.26A5.12.23.661, 31 Desember 2023	49.274.181
3	Jasa Outsourcing Tenaga Alih Daya	PL.02.01.26A.26A5.10.23.198, 31 Oktober 2023	PL.02.01.26A.26A5.12.23.662, 31 Desember 2023	34.339.070
Jumlah				**120.146.951**

Pekerjaan pengadaan Jasa Outsourcing telah diselesaikan dan telah dilakukan serah terima pada tanggal 31 Desember 2023.